

ARTIKULASI IDEOLOGI POLITIK MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA

Saidin Ernas

Dosen Sosiologi Politik IAIN Ambon
ernassaid@gmail.com

Abstract

This writing seeing reinforce that has grown recently that in the case of Indonesia, commitment no longer parallel with religious orientation and political expression. Some event as political factors on and election shows that religion is no longer a factor in influencing determinan political choice. Majority muslims in indonesia to regard as different political arena by religiosity. Then factors as political leadership, principal capacity, trackrecord and personal images determinant in the choice of politics. Nevertheless, this studies also indicated that changes and shifting political orientation voters not altogether may be claimed as the success of the process of secularization in political modernization in indonesia. It appears the phenomenon of pragmatism and hypocritizm become indonesia chief symptom in politics today. These symptoms shows that political arena just a sign of the power struggle and efforts to hunt down interest (rente) on the parties involved in it. In practice this kind of political, the interest of the people can no longer be the locus of the main in the ideology and political vision.

If a political party or the political power of Islam in Indonesia do not want to have setbacks and landed in the defeat and destruction is available continuously, we must immediately conduct reorientasi and political reposition. Islamic Politic were not political can depend on the belief an absurd sociological that (the majority of people islam in indonesia were muslim , then they will certainly choose of the Islamic Party). On the other hand if we want to become the strength of dominant political , the political power of Islam must be able to ideology reposition, political agenda and the acts of political and more substantive and earthiness contemporary according to the need of the Islamic Community of Indonesia.

Keywords: *Relegiousitas, Oriantasi Politik, Pragmatisme-Hipokritisme*

Pendahuluan

Fenomena agama dan kepolitikan dalam kehidupan masyarakat Islam

di Indonesia memiliki keunikan yang menarik untuk dicermati. Secara umum masyarakat Islam di Indonesia dikenal sebagai komunitas beragama yang religious, mereka memiliki komitmen keagamaan yang sangat tinggi. Hal ini dapat diamati pada berbagai kegiatan ritual keagamaan baik yang dilakukan secara individual maupun yang dilakukan bersama secara klosal seperti pelaksanaan ibadah Haji. Angka jamaah Haji dari tahun ketahun terus meningkat bahkan jumlah calon jamaah haji yang mendaftar selalu melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, sehingga mengakibatkan daftar tunggu (antrian) yang cukup panjang. Di berbagai tempat dibangun Masjid, di desa, di kota, bahkan di kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Fenomena ini paling tidak menjadi bukti nyata bahwa komitmen keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia sangatlah tinggi.

Namun fakta bahwa jumlah pemeluk Islam yang mayoritas di Indonesia dengan komitmen keagamaan yang cukup tinggi tersebut tidak lantas menjamin bahwa ekspresi dan orientasi politik umat Islam di Indonesia memberi dukungan pada menguatnya politik Islam; partai Islam, Ideologi Islam, pemimpin Islam bahkan juga Negara Islam. Partai-partai politik yang menggunakan Islam sebagai azas, tidak pernah memperoleh dukungan politik yang kuat dan mayoritas di Indonesia. Justru sebaliknya partai politik yang berbasis ideologi nasionalis atau yang lainnya yang memperoleh dukungan kuat dan berhasil memenangkan pemilu. Fakta ini terus terjadi sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu terakhir tahun 2009, partai politik Islam selalu menuai kekalahan.¹ Maka pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa komitmen keislaman yang demikian kuat tersebut tidak selalu paralel dengan dengan orientasi politik? Mungkinkah religiusitas tidak berdampak pada pilihan politik individu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi?

Sejauh ini telah banyak studi yang mencoba menjelaskan, mengurai atau menjawab fenomena Islam dan orientasi politik dalam kasus di Indonesia. Zuly Qodir (2010: 35-57) dalam studinya tentang gerakan Islam Liberal

¹ Pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Masyumi berada di urutan kedua dan Partai Komunis Indonesia di urutan ketiga, sementara Partai NU berada di urutan keempat. Secara historis, pemilu 1955 merupakan prestasi politik terbaik yang pernah diraih Partai politik Islam di Indonesia.

di Indonesia membuat tiga kategorisasi dalam memahami Islam di Indonesia; (1) structural-politik, (2) structural-antropologis, (3) struktural-kultural. Kategori tersebut dapat dirangkum dalam dua model pendekatan yang paling menonjol dan sering digunakan dalam mengurai Islam dan politik di Indonesia. *Pertama*, studi structural-politik tentang relasi antara agama (Islam) dan politik (Negara) yang menghasilkan pandangan bahwa ada rekayasa untuk selalu menempatkan politik Islam dalam posisi yang inferior *vis a vis* politik negara. Proses “penjinakan ini” ini secara khusus berlangsung selama kekuasaan rezim Orde Baru. Negara melalui kekuatan rezim nasionalis dan militer telah “membonsai” kekuatan politik Islam sehingga dari waktu ke waktu mengalami penurunan ekspektasi dan dukungan dari kalangan pemilih muslim. Negara secara terus menerus juga telah memperkuat wacana bahwa Islam dan politik tidaklah sebangun (*compatible*), sehingga kewajiban keagamaan tidak lantas mewajibkan umat Islam atas pilihan politik pada partai ataupun symbol politik Islam.

Kedua, studi sosiologis-antropologis yang mencoba melacak ekspresi politik Islam di Indonesia dalam prespektif karakter budaya (antropologis) dan perubahan sosial (sosiologis). Dalam pandangan ini disebutkan bahwa meskipun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan memiliki komitmen keagamaan yang cukup tinggi (*religious*), namun kultur politik Islam di Indonesia tidak memberi ruang bagi menguatnya tatanan politik agama. Justru pengaruh Islam menguat pada ranah kebudayaan dan sistem nilai masyarakat Indonesia. Islam di Indonesia adalah Islam yang unik, karena bersekutu dengan kebudayaan lokal. Hal ini melahirkan model keberagamaan yang sinkretis dan perilaku politik yang cenderung kompromistis. Kondisi ini pada akhirnya membentuk suatu karakter keagamaan yang *a-politic* (non-ideologis). Maka muncul beragam *term* dalam studi Islam, seperti; Islam cultural, Islam Jawa, Pribumisasi Islam, Islam alternatif, Islam transformatif dan lain sebagainya. Sementara studi sosiologis yang memusatkan pada agama dan perubahan sosial, memandang bahwa umat Islam di Indonesia sedang bertransformasi dari masyarakat religious-tradisional kepada masyarakat religious-moderen yang semakin sekuler. Proses sekularisasi ini melahirkan suatu kondisi masyarakat yang telah memisahkan antara komitmen keagamaan yang dianggap sebagai sesuatu yang personal-privat dan sakral serta orian-

tasi-orientasi politik yang bersifat publik dan profan. Proses sekularisasi ini didukung secara konsepsional oleh para intelektual Muslim seperti Nurkholis Madjid (1987), pada pertengahan tahun 80-an melalui jargon sekularisasi Islam; Islam Yes, Partai Islam No.

Tulisan ini akan menelaah lebih lanjut pandangan sosiologis tentang sekularisasi tersebut dan kemungkinan pengaruhnya terhadap orientasi politik umat Islam di Indonesia. Bagaimana proses sekularisasi tersebut berjalan dan bagaimana pengaruh dan dampaknya terhadap orientasi politik umat Islam di Indonesia. Dan tentu saja bagaimana Politik Islam harus mereorientasi diri dalam sistem politik Indonesia yang semakin dinamis.

Religiusitas, Sekularisasi dan Komitmen Keagamaan.

Para teoritis ilmu sosial mengembangkan konsep yang akan memberi penjelasan tentang mengapa komitmen keagamaan tidak selalu paralel dengan orientasi-orientasi politik dalam sebuah komunitas beragama, termasuk dalam hal ini umat Islam. Dalam kajian sosiologis pendekatan ini melahirkan teori sekularisasi atau sekularisme. Dalam sejarahnya apa yang dimaksudkan dengan konsep sekularisme atau sekuler merupakan istilah sosio-politik yang lahir dari pengalaman Barat yang “traumatic” tentang peran agama dalam kehidupan bernegara sejak Abad ke-16. Gereja (Roma Katolik) menjadi institusi yang menakutkan dan menjadi benteng penjaga konservatisme agama. Gereja menjadi institusi yang tidak mentolelir perbedaan keyakinan, pemahaman keagamaan, pandangan politik bahkan perkembangan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan pemahaman gereja. Sejumlah Ilmuan seperti, Galileo terpaksa harus menghadapi hukuman mati karena mengemukakan pandangan astronomi yang berbeda dengan apa yang dipahami gereja dalam kitab suci.

Berdasarkan pengalaman traumatic tersebut maka masyarakat Barat berupaya menghapus sistem religio-politik integralisme Katolik di abad pertengahan yang dianggap menindas, melalui gerakan reformasi keagamaan (Suhelmi: 2000). Sejak saat itu, dimulai era kebangkitan dan pencerahan (*renaissance*) yang menandai proses sekularisasi yang melahirkan negara-negara sekuler di Barat (*nation state*) dan secara nyata memisahkan urusan gereja dan urusan kenegaraan. Dalam konsep ini agama (gereja) cukup berperan dalam

mengatur berbagai urusan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan politik (Negara) mengatur hubungan antar manusia. Konsep ini tidak menutup kesempatan warga Negara memeluk agama tertentu, karena Negara memberikan kebebasan kepada warganya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Tahima Rasyid (2007:156) mengungkapkannya sebagai berikut:

“However, in general, 'secular' is understood as the belief that religious influence should be restricted; and that education, morality, and the state (etc.) should be particularly independent of religious influence”.

Secara sosiologis proses sekularisasi juga merupakan respons atas berbagai perubahan sosial yang terjadi secara cepat dalam masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan penggunaannya oleh masyarakat, komunikasi dan transformasi, urbanisasi, perubahan/peningkatan harapan dan tuntutan manusia (*rising demands*) yang semuanya ini mempengaruhi cara manusia dalam beragama. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia mempertanyakan kebenaran agama dan sekaligus menggugat otoritas Tuhan dalam menentukan proses perubahan. Sosiolog seperti Auguste Comte (1798-1857),² yakin bahwa saat ini manusia telah mencapai tahap positif, dimana manusia telah sanggup berpikir secara alamiah dan rasional sehingga peranan agama menjadi tidak dibutuhkan lagi (Ritzer dan Doglas J. Godman, 2004: 16-17).

Sejak sekularisme tumbuh menjadi teori sosial yang kuat, ia mempengaruhi hampir semua segi kehidupan manusia. Termasuk dalam hal ini eksistensi agama yang dianggap mengatur semua segi kehidupan. Agama dalam pandangan sekularisme hanya menjadi urusan pribadi (*privatized*) dan tidak boleh masuk dalam kehidupan public (Qodir: 2009: 148-149). Secara sistematis agama pun harus dipisahkan dari Negara sehingga ekspresi politik

² Comte membagi perkembangan manusia melalui hukum tiga tahap (*the law of three stages*) yang berisikan tahap-tahap perkembangan pikiran manusia : (a) tahap teologis ialah tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia (b) tahap metafisis, pada tahap ini manusia percaya bahwa gejala-gejala di dunia ini disebabkan oleh. Manusia belum berusaha untuk mencari sebab dan akibat gejala-gejala tersebut (c) tahap positif, merupakan tahap dimana manusia telah sanggup untuk berpikir secara ilmiah.

tidak mesti representasi keyakinan keagamaan. Dalam banyak kasus, sekularisasi melemahkan ideologi politik Islam yang menghendaki munculnya Negara Islam. Salah seorang intelektual Islam asal mesir, Ali Abdul al-Raziq (1988-1966) menolak kaitan antar agama dan politik (Negara) dengan mengemukakan pandangan tentang tidak adanya referensi mengenai pendirian Negara Islam oleh Nabi Muhammad. Menurut Raziq, Islam bisa menerima bentuk apapun Negara yang memiliki perangkat untuk menegakkan hukum atau keadilan (*'adalah*), persamaan derajat atau egalitarianisme (*musawah*), dan demokrasi atau (*syura*) (Efendi, 1998).

Keberhasilan sekularisme di Eropa yang ditandai dengan kemajuan sosial politik, ekonomi dan kebudayaan, telah menginspirasi beberapa negeri muslim yang kala itu sedang berada dalam kondisi yang lemah. Misalnya Turki, negeri yang sedang mengalami kekalahan militer memandang bahwa jalan untuk bisa meraih kemajuan sebagaimana bangsa Eropa yang maju adalah mengurangi secara signifikan pengaruh agama dalam politik (Nasih, 2010). Pemimpin Turki Kamal at-Taturk bahkan menerapkan model sekularisme yang sangat radikal yakni “sekularisme laicisme” yang menyingkirkan agama dari kehidupan public. Segala sesuatu yang dianggap memiliki kaitan dengan agama atau dianggap symbol agama tertentu, dilarang keras. Laicisme dalam kategori ini menekan agama. Negara tidak berada dalam posisi netral tetapi menempati posisi superior dan menggunakan perangkat-perangkat Negara untuk mengambil tindakan terhadap entitas-entitas keagamaan yang menampakkan simbol-simbolnya.

Debat tentang sekularisasi juga telah mewarnai diskursus intelektual dan politik di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kelompok Islam yang diwakili tokoh-tokohnya seperti Mohammad Nasir, Ki Bagus Hadikusumi, menginginkan Negara Islam dan memperjuangkannya secara terus-menerus melalui jalur parlemen. Adapun kelompok nasionalis didikan Barat yang dipelopori Sukarno, Mohammad Yamin dan Hatta, menghendaki Indonesia sebagai negara nasional yang tidak berdasarkan agama tertentu, termasuk Islam. Sejarah mencatat kelompok Politik Islam gagal mewujudkan ambisi politik hingga saat ini.

Di tataran intelektual juga terjadi diskursus intelektual yang menarik tentang sekularisasi. Tokoh Islam seperti Nurcholis Majid dan juga Abdurrah-

man Wahid justru mendorong proses sekularisasi sistem politik di Indonesia. Sama halnya dengan Ali Abdul al-Raziq, mereka menolak hadirnya Negara Islam yang dianggapnya tidak memiliki referensi yang kuat dalam ajaran Islam dan sejarah kehidupan Nabi. Desakan konseptual Nur Kholis juga berjalan-kelindan dengan praktik politik rezim Orde Baru yang terus mengintimidasi kekuatan politik Islam. Masyarakat secara sistematis didorong hanya memilih Partai Golkar, sementara partai politik dan kekuatan politik Islam selalu dipinggirkan.

Proses sekularisasi yang melanda banyak sudut kehidupan politik itu ternyata telah mendorong proses deideologisasi politik di Indonesia. Partai Politik Islam yang muncul sejak tahun 1999, seiring dengan gelombang reformasi politik juga tidak mampu menunjukkan diri sebagai representasi kekuatan politik Islam. Bahkan terjadi perpecahan politik di kalangan Islam yang melahirkan banyak partai Islam maupun partai-partai tengah yang memiliki komitmen keislaman yang kuat seperti PAN dan PKB. Kondisi ini juga semakin diperburuk oleh sikap pragmatisme politik yang melanda partai-partai Islam yang tidak kuat menahan diri dari rayuan kekuasaan dan praktik politik transaksional. Koalisi maupun aliansi politik tidak dibangun atas dasar ideologi politik yang diklaimnya, tetapi lebih pada kedekatan kepentingan pragmatis dan kebutuhan politik.

Sementara itu, di tengah komunitas muslim juga terjadi perdebatan tentang makna penting memilih partai Islam. Sebagian menganggap memilih partai politik tidak sama dan sebangun dengan beragama, karena itu tidak mesti memilih partai Islam dalam pemilu. Masyarakat cenderung memilih pemimpin atas dasar pertimbangan pragmatis dan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Masyarakat juga melihat bahwa tokoh-tokoh politik Islam secara umum tidak membawa aspirasi politik Islam karena sebagian bertindak pragmatis, mementingkan kelompok atau sekedar berburu rente. Sebagai contoh di kalangan pesantren yang selama ini dekat dengan kekuatan politik Islam justru menunjukkan fenomena resistensi politik. Maka di beberapa kantong pesantren, partai politik Islam yang didukung pesantren justru mengalami kekalahan dari partai nasional seperti Demokrat, Golkar ataupun PDIP (Ernas: 2009). Tampaknya kesadaran beragama –yang meminjam istilah Saiful Mujani, semakin rasional dan moderen– telah me-

ningkatkan kesadaran dan pencerahan politik umat Islam, sehingga mereka mampu membedakan aspek keagamaan sebagai sesuatu yang sacral dan perilaku politik yang profan (Mujani, 2004).

Melemahnya Preferensi Agama dalam Politik: Kontestasi Sejumlah Kasus

Gerakan reformasi yang berhembus kencang pada tahun 1998, menghancurkan otoritarianisme Orde Baru dan melahirkan fenomena politik yang membawa berbagai perubahan yang signifikan pada lanskap politik Indonesia. Liberalisasi politik telah melahirkan sistem multi partai yang memberi peluang pada kembalinya partai politik Islam yang sempat terlarang pada era Orde Baru. Tercatat lebih dari 50 partai politik dan sekitar 40 persen diantaranya adalah partai politik Islam. Aspek penting lain dari produk reformasi adalah hadirnya sistem pemilihan langsung yang memberi keleluasaan kepada rakyat untuk menentukan sendiri para pemimpin, mulai dari pusat hingga daerah.

Fenomena munculnya ideologi politik Islam dan kesempatan pemilihan langsung memberi ruang bagi kita untuk melakukan penilaian tentang bagaimana hubungan antara semangat beragama dan orientasi politik umat Islam di Indonesia. Artinya apakah umat Islam di Indonesia yang dikenal religius ini memberikan dukungan pada menguatnya politik Islam atau malah sebaliknya. Karena itu kita perlu mencermati beberapa peristiwa politik yang terjadi pasca reformasi. Dalam tulisan ini ada tiga proses politik yang akan dianalisis sebagai contoh, yakni pemilu legislatif, Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga peristiwa tersebut, menurut hemat penulis, dapat mengkonfirmasi sejauhmana orientasi politik umat Islam di Indonesia.

Setelah keberhasilan gerakan reformasi 1998, dilangsungkan pemilu pertama satu tahun setelahnya (tahun 1999) yang diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai spektrum ideologi (kecuali komunisme yang masih tetap terlarang). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampil sebagai pemenang (32% suara sah nasional). Berturut-turut lima partai utama yang masuk lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebang-

kitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Pada pemilu lima tahun berikutnya (2004), yang diikuti 38 partai politik, Partai Golkar berhasil tampil sebagai pemenang (23,27%) dan diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan pada Pemilu tahun 2009, partai demokrat tampil sebagai pemenang (20,85%), disusul Golkar dan PDIP. Dan terakhir pada Pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampil sebagai pemenang (20%), disusul Golkar dan Partai Gerindra.³

Dinamika pemilu selama 20 tahun reformasi menunjukkan satu fenomena bahwa partai politik Islam sangat sulit untuk tampil sebagai pemenang. Bahkan terjadi penurunan secara signifikan dari pemilu ke pemilu. Menurut data web resmi KPU, keseluruhan parpol Islam pada Pemilu 1999 hanya memperoleh 34,2 persen suara, lalu pada Pemilu 2004 mengalami peningkatan menjadi 43,27 persen suara. Namun, pada Pemilu 2009 jumlah suara partai Islam turun menjadi 30 persen. Padahal, jumlah parpol Islam yang mengikuti pemilu tak banyak mengalami perubahan. Azyumardi Azra dalam buku kumpulan sebuah wawancara mengatakan partai Islam tidak lagi prospektif, sebab formalisme politik Islam lewat pendirian parpol yang secara tegas memakai simbol-simbol Islam tidak lagi menarik bagi pemilih muslim di Indonesia.⁴

Adapun pengalaman untuk memilih Presiden secara langsung di Indonesia yang pertama kali diterapkan pada tahun 2004 juga memberi pelajaran berharga. Ada lima calon presiden yang ikut bertarung pada pemilu presiden saat itu, yakni: (1) Wiranto dan Solahudin Wahid, (2) Megawati Sukano Putri dan KH. Hasyim Muzadi, (3) Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla, (4) Amien Rais dan Siswono Yudirhusodo, serta (5) Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Pada pemilu 2004 tersebut pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Hal yang menarik dari proses dukung mendukung capres yang terjadi pada tahun 2004 adalah terbelahnya dukungan politik Parpol Islam pada sejumlah pasangan calon.

³ Dikutip dari <http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilihan-umum-indonesia-1999.html>, diakses tanggal 7 Desember 2014.

⁴ Lihat wawancara dengan Azumardi Azra dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah*, Jakarta: 1999

Pertama, koalisi Partai Politik Islam yang dimotori PAN dan PKS yang mendukung pasangan Capres Amien Rais dan Siswono Yudirhusodo. Kedua, koalisi partai politik Islam yang dimotori oleh PPP yang mendukung pasangan Capres Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Kedua pasangan tersebut merupakan representasi dari kekuatan politik Islam, namun secara nyata, gagal memaksimalkan dukungan politik dari umat Islam. Pasangan capres Amien Rais dan Siswono hanya berhasil mengumpulkan 7 persen suara. Sedangkan pasangan Capres Hamzah Haz dan Agum Gumelar hanya mengumpulkan 3 persen suara.

Amien Rais sebagai mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah tidak berhasil menarik dukungan para pengikut Muhammadiyah yang diperkirakan mencapai 21 juta anggota dan simpatisan di seluruh Indonesia. Demikian halnya dengan Hamzah Haz yang merupakan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berasal dari kekuatan NU juga tidak mampu memaksimalkan dukungan dari organisasi terbesar tersebut. Tampaknya faktor agama tidak terlalu berperan dalam mempengaruhi dan menentukan pilihan politik para pemilih. Para pemilih yang mayoritas muslim, masih melihat figur Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai sosok pemimpin yang diidamkannya. Meskipun SBY bukanlah tokoh politik Islam (santri) sebagaimana Amien Rais atau Hamzah Haz. Ironisnya pada pemilu 2009, hampir semua partai Islam justru mendukung pasangan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Budiono. Kedua figure tersebut tidak memiliki afiliasi politik maupun latar belakang politik yang berhubungan dengan Partai Islam.

Arena Pilkada memberi kesempatan lebih baik bagi para peneliti di bidang perilaku pemilih untuk melihat kaitan antara agama dengan pilihan pemilih---dibandingkan dengan arena pemilihan presiden sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Mengapa? Hal ini karena dalam Pemilu Presiden, umumnya kandidat yang maju semuanya berlatar belakang agama Islam. Pengalaman Pemilu 2004 dan Pemilu Presiden 2009, memperlihatkan semua calon presiden dan wakil presiden beragama Islam. Karena latar belakang agama semua calon adalah sama, agak sulit untuk menyimpulkan bahwa latar belakang pemilih berperan/tidak berperan dalam memilih calon. Hal ini berbeda dengan Pilkada. Dalam Pilkada, banyak kita jumpai, adanya

calon (baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah) yang berbeda agama. Fakta ini menarik untuk melihat apakah pemilih dengan latar belakang agama tertentu lebih cenderung untuk memilih calon dengan agama yang sama.

Sebagai contoh bisa diperhatikan kasus pemilukada yang terjadi di kota Ambon pada tahun 2006 dan tahun 2011. Pilkada Kota Ambon adalah kasus yang menarik ketika kita membahas mengenai kaitan antara agama dan perilaku pemilih, karena dua alasan. *Pertama*, meski mayoritas penduduk Ambon beragama Kristen (Protestan), namun dalam jumlah cukup besar (26.2%) penduduk Ambon beragama Islam. Kedua, Kota Ambon pernah mengalami konflik agama yang berkepanjangan antara Islam dan Kristen sepanjang tahun 1999-2003. Menarik untuk melihat apakah sentimen agama turut menjadi dasar bagi pemilih di Ambon dalam memilih kandidat. Singkatnya, apakah pemilih Islam lebih cenderung memilih kandidat yang beragama Islam dan sebaliknya pemilih Kristen cenderung memilih kandidat yang beragama Kristen.

Pilkada Kota Ambon tahun 2006 sendiri diikuti oleh lima pasangan calon, masing-masing Hendrik Hattu-Iskandar Walla; John Malaiholo-Irma Betaubun; Made Rachman Marasabessy- Aloysius Lesubun; M.J. Papilaya-Olivia Ch. Latuconsina dan pasangan Richard Louhenapessy-Syarief Hadler. Pilkada dimenangkan oleh pasangan M.J. Papilaya-Olivia Ch. Latuconsina dengan perolehan suara 36.12%. Dari lima kandidat walikota, hanya satu yang beragama Islam, yakni Made Rachman Marasabessy. Dalam survey yang dilakukan oleh LSI (2006), responden ditanya apakah latar belakang agama kandidat sebagai hal yang penting diperhatikan atau tidak, sebagian besar (67.6%) mengatakan kurang penting atau tidak penting sama sekali. Baik pemilih Islam ataupun Kristen sama-sama menyatakan latar belakang kandidat bukan menjadi pertimbangan penting dalam memilih calon.

Pemilih di Ambon menunjukkan dalam pendapat (opini) mereka, sentimen agama tidak penting. Pendapat ini terbukti kalau kita lihat bagaimana distribusi pemilih menurut agama. Di kalangan pemilih Islam, suara Made Rachman Marasabessy tidak lah mayoritas. Di kalangan pemilih Islam, justru pasangan Richard Louhenapessy-Syarief Hadler yang mendapat suara terbesar. Di kalangan pemilih Islam, suara untuk Made Rachman Marasabessy bahkan cenderung menurun, dari semula 34.5% di bulan Februari 2006

menjadi 26.9% di bulan Mei 2006.

Pada Pilkada kota Ambon tahun 2011 yang diikuti oleh delapan pasang Calon, 7 pasangan calon memilih komposisi Kristen-Islam (calon walikota beragama Kristen dan calon wakil walikota beragama Islam). Sedangkan satu pasangan calon memilih komposisi Islam Kristen (calon walikota beragama Islam dan calon wakil walikota beragama Kristen). Namun hasil pemungutan suara menunjukkan pasangan calon Richard Louhanapessy dan Syam Latuconsina (Kristen-Islam) sebagai pemenang dalam satu putaran dengan mengumpulkan 36 % persen suara. Sedangkan Olivia Latuconsina (Wakil Walikota patahana) yang merupakan calon walikota beragama Islam berpasangan dengan penyayi Andre Hehanusa sebagai calon wakil Walikota hanya mengumpulkan 11 % suara.

Ada sejumlah perihal yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa sentimen agama ini kurang bermain dalam Pilkada Kota Ambon. Kemungkinan pertama, konflik agama yang sedemikian panjang membuat warga Ambon sudah bosan dengan pembedaan berdasar agama. Ini makin terlihat ketika dalam kampanye, isu-isu yang bernada konflik agama praktis tidak terlihat. Kemungkinan kedua, perpaduan kandidat Islam dan Kristen (sebagai walikota dan wakil walikota) di semua kandidat tampaknya membuat pemilih tidak melihat Pilkada sebagai pertarungan antar calon Islam lawan calon Kristen. Dan kemungkinan ketiga sebagaimana dibuktikan dengan hasil beberapa lembaga survey adalah kapasitas dan kapabilast figur. Richard Louhanapessy telah dikenal sebagai seorang politisi kawakan, berpengalaman dalam berbagai jabatan politik di Maluku selama 25 tahun, pernah menjabat ketua DPRD Propinsi Maluku dan dikenal dekat dengan rakyat. Sementara wakilnya Syam Latuconsina dianggap sebagai figur wakil walikota yang tepat, karena menjabat sebagai kepala Dinas Tata Kota yang berhasil mempercantik kota Ambon dari puing-puing konflik. Figur Syam juga dinilai berhasil merelokasi para pedagang kaki lima, tanpa menimbulkan gejolak.

Fakta politik ini memperkuat penjelasan tentang adanya kecenderungan umat Islam dalam menentukan pilihan tidak melulu berkaitan dengan pandangan keagamaan. Masyarakat Ambon semakin rasional untuk membedakan urusan public dan privat. Maka pilihan pada seorang pemimpin lebih ditentukan oleh kelayakan figure, citra politik, kapasitas dan kompetensi da-

lam memimpin. Hal ini juga menjelaskan mengapa pemilih muslim cenderung melewati agama sebagai factor penentu dalam orientasi politik.

Artikulasi Ideologi Politik: Sekularisasi atau Hipokritisme?

Beragama sejatinya menuntut kesadaran untuk mengejawantahkannya nilai-nilai dan ajaran agama dalam kehidupan yang nyata. Hal ini termasuk dalam bidang politik, dimana komitmen keagamaan seseorang seharusnya menuntunnya dalam menentukan sikap politiknya. Namun bila kita memperhatikan perilaku politik para pemilih muslim di Indonesia, tampaknya terjadi sejumlah perubahan dan pergeseran. Religiusitas sebagai seorang muslim tidak lantas sama dan sebangun dengan komitmen politik pada apa yang kemudian kita sebut sebagai politik Islam (pemimpin Islam, symbol Islam, bahkan Negara Islam). Kajian ini membuktikan bahwa dalam berpolitik, umat Islam Indonesia saat ini tidak mau dibuat rumit oleh persoalan agama. Nalar pragmatisme politik betul-betul berlangsung. Misalnya saja dalam bentuk persekutuan antar elite santri dan bukan santri. Pada level pemilih, sentimen-sentimen agama tidak lagi menjadi faktor penting yang menentukan pilihan mereka. Hal ini tidak berarti sebaliknya bahwa umat Islam di Indonesia bukanlah kelompok religious, karena tentu kontradiktif dengan praktek keagamaan yang semarak di Indonesia.

Tulisan ini menunjukkan beberapa factor yang turut mempengaruhi perilaku keagamaan dan perilaku politik yang cenderung kontradiktif itu. Pilihan politik ternyata hanyalah suatu aksi rasional yang tidak tunggal. Pemilih Islam Indonesia masa kini dalam menentukan pilihannya banyak dipengaruhi oleh berbagai factor. Penelitian William Liddle dan Saiful Mujani (2007), memperlihatkan beberapa pengaruh tersebut. Pertama, persepsi mereka terhadap figure kepemimpinan yang kapabel dan memiliki citra politik yang baik dalam kehidupan politik. Hal ini tampak pada pemilihan Presiden seperti yang diuraikan di atas. Meskipun SBY bukan merupakan tokoh keagamaan atau memiliki *trackrecord* sebagai tokoh Islam, namun secara personal ia dilihat sebagai jawaban atas kebutuhan politik masyarakat. Ia seorang militer, intelek, smart (*versi popular culture*) sehingga digandrungi oleh para pemilih. Kedua, persepsi pemilih tentang kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah konkrit di bidang ekonomi, hukum dan kesejahte-

raan sosial.

Sama halnya dengan pilkada yang terjadi di berbagai daerah. Para bupati dan walikota juga dipilih berdasarkan factor-faktor positif di atas sekaligus juga berdasarkan kekuatan jaringan politik dan kedekatan mereka dengan rakyat. Meskipun agama, dalam hal ini Islam masih menjadi salah satu variable, namun tidak lagi menjadi penentu (*determinan*). Dalam kasus yang lain, di Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, pada pemilu tahun 2009, para santri dan masyarakat di sekitar Krapyak lebih memilih PDIP daripada partai Islam. Meskipun Tokoh Pesantren Krapyak juga mencalonkan diri sebagai legislator melalui Partai PKNU. Setelah diselidiki, hal itu terjadi karena masyarakat melihat calon-calon yang tampil dari PDIP lebih menjanjikan daripada calon partai Islam yang dijaogokan pesantren Krapyak (Ernas, 1999).

Apakah fenomena paradoksal antara semangat beragama dan komitmen politik ini bisa disebut sebagai bentuk kemandirian para pemilih yang semakin rasional. Dapatkah hal ini bisa menjadi kesimpulan pendahuluan bahwa proses sekularisasi politik di Indonesia telah berhasil menuju modernisasi politik yang didambakan banyak ilmuan politik. Bila menyimak pemaparan kasus-kasus dalam tulisan ini maka kesimpulan tersebut dapat kita benarkan. Namun demikian proses sekularisasi politik di Indonesia tidak berlangsung konsisten. Artinya berkurangnya peran agama dalam referensi politik pemilih, tidak selalu mengantarkan pemilih muslim pada pilihan politik yang rasional. Terkadang orientasi politik juga dipengaruhi oleh factor-faktor pragmatis-transaksional yang saat ini menjadi paradoks dalam politik di Indonesia. Koalisi antar parpol, aliansi antara tokoh dan kelompok politik lebih banyak didasarkan atas pertimbangan pragmatis dan kepentingan jangka pendek para politisi. Bahkan sebagian dipengaruhi oleh kekuatan uang dan aspek-aspek ekonomi. Para pemilih dapat diarahkan, dimobilisasi dan diperoleh dukungannya dengan berbagai iming-iming rupiah, paket sembako, bantuan sosial dan janji pragmatisme lainnya.

Maka sekularisasi politik di Indonesia justru melahirkan budaya hipokrit yang menghinggapi para tokoh dan pelaku politik. Melemahnya factor agama dalam ekspresi politik tidak semata bisa dinilai sebagai menguatnya rasionalitas dalam politik, atau sikap politik yang semakin modern sebagaimana

fenomena di Barat. Sebab sekularisasi politik itu memiliki wajah lain yang turut bermain dalam praktek politik di Indonesia. Yakni munculnya politik pragmatis yang cenderung hipokrit, sebagai arus utama dalam politik. Hipokritisme secara substansial akan melemahkan kekuatan demokrasi sebagai jalan utama menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Sebab budaya hipokrit dan pragmatis dalam politik hanya melahirkan kekuatan politik yang didominasi oleh para pelaku politik yang tidak memiliki kepedulian pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak. Dengan hanya mengandalkan kekuatan uang dan politik citra yang bisa diorder dari sejumlah Lembaga Survei, maka seseorang mampu meningkatkan elektibilitasnya di hadapan para pemilih. Inilah ruang kosong yang terjadi pada hilangnya komitmen keagamaan dalam politik.

Kekalahan Politik Islam dan Reorientasi Politik

Kontestasi politik Indonesia sejak era reformasi telah menunjukkan secara nyata bahwa komitmen keagamaan tidak selalu paralel dengan orientasi politik. Meskipun konklusi ini perlu diselidiki lagi secara mendalam, karena tidak berlaku secara penuh khususnya dalam beberapa kasus secara spesifik. Sejumlah Partai Agama seperti PKS dan PPP yang masih bertahan menunjukkan bahwa masih ada pemilih yang menggunakan pertimbangan keagamaan dalam memilih. Namun perkembangan tersebut secara pesimistis disimpulkan oleh sebagian pengamat, seperti Harold Crouch (2009), semata-mata kebangkitan kelompok-kelompok politik Islam. Kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok-kelompok Islam sebagai entitas sosiologis dalam masyarakat. Bukan sebagai sebuah kebangkitan politik Islam sebagaimana yang terjadi di Turki.

Dari sini barangkali, ikut menjelaskan mengapa dukungan terhadap partai Islam di Indonesia sejak Pemilu 1999 hingga 2009 tidak mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan mengalami kemunduran. Hal ini mirip dengan eksistensi Partai Agama di sejumlah Negara Barat (Eropa dan Amerika). Di Jerman misalnya, Uni Kristen Demokrat masih dapat memenangkan Pemilu dan mengantarkan Angela Merker menjadi Presiden Jerman, meskipun sejumlah pengamat mengatakan keraguannya bahwa kemenangan Uni Kristen Demokrat adalah kemenangan kekuatan keagamaan.

Sebab sebagaimana hasil survey menunjukkan bahwa ada hubungan antara kinerja partai dengan pilihan masyarakat. Sebagaimana data yang ditunjukkan di atas, secara umum preferensi agama dalam politik sangat rendah. Meskipun demikian dalam kasus pilkada di beberapa kota, kecenderungan memilih untuk memilih kandidat karena alasan keagamaan juga masih ditemukan. Misalnya di Ambon, kontestasi sosiologis mewajibkan hampir semua calon masih mengakomodasi kehadiran figure dari kalangan Islam dan Kristen.

Menurut Bachtiar Efendi (2001:28) berbagai perubahan tersebut merupakan perkembangan intelektualisme Islam baru yang membawa kepada berbagai implikasi. Khususnya bagi perkembangan diskursus pemikiran dan praktik politik Islam itu sendiri yang mendorong para pemikir dan aktifis Islam untuk (1) mereformulasikan dasar-dasar keagamaan/teologi politik Islam; (2) mendefinisikan ulang cita-cita politik Islam; (3) meninjau strategi politik Islam. Partai politik Islam harus menyadari munculnya arus utama teologi baru politik Islam di Indonesia yang telah bergeser dari orientasi symbol (formalistic/legalistic) kepada dasar-dasar baru yang lebih berorientasi nilai (subtansialistik). Partai Islam yang sibuk dengan kampanye ideologis seperti “syariatisasi”, negara Islam dan lain-lain akan ditinggal oleh masyarakat pemilih muslim. Karena masyarakat justru membutuhkan Partai Politik yang mampu memenuhi kepentingan pragmatisnya. Partai politik harus lebih terlibat pada agenda kerja yang lebih berorientasi kepentingan masyarakat banyak. Tidak hanya bersandar pada sekedar kegiatan politik partisan, dan parlemen sebagai satu-satunya medan perjuangan.

Dalam hal ini Partai Islam di Indonesia bisa belajar pada fenomena Partai *Justice and Development Party* atau (AKP) di Turki. Meskipun AKP merupakan Partai yang bersandar pada nilai-nilai agama namun berhasil mengalahkan partai-partai sekuler yang didukung oleh kekuatan militer Turki yang sekuler. Hingga saat ini di Turki, atau Partai Pembangunan Keadilan (AKP) yang berideologi Islam berhasil menyisihkan pesaing-pesaingnya dalam pemilihan umum Parlemen Turki. Partai pendukung Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan ini menang agregat 46,7% atau memperoleh 341 dari 550 kursi di parlemen (*Grand National Assembly*).⁵ Menurut Mohammad Nasih

⁵ Lebih Lanjut Lihat Zeyno Baran, “Turkey Divided”, *Journal of Democracy*, Vol. 19, No.

(2009) hal ini terjadi karena Partai Islam di Turki mampu merespon secara tepat semangat zaman, mengubah agenda-agenda politik menjadi agenda aksi pada sejumlah kebutuhan real konstituen.⁶ Dan yang lebih penting lagi, Partai AKP mampu mempersonifikasi diri sebagai partai politik yang bersih, para pemimpinnya memiliki integritas dan jauh dari tuduhan korupsi yang menjadi penyakit kita di zaman ini.

Dengan demikian politik Islam di Indonesia dituntut untuk melakukan reorientasi tentang ideologi, mendefinisikan secara tepat cita-cita politik Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan umat dan semangat zaman, serta secara kreatif memilih strategi politik atau meminjam istilah Bactiar Efendi lebih bersifat inklusif, integratif dan diversifikatif (Effendi, 2001:33). Politik Islam harus mampu memperlihatkan daya juang yang luar biasa dalam menghadapi pragmatisme politik. Namun pada saat yang sama mampu memberikan solusi konkrit pada masalah-masalah kemasyarakatan dalam waktu segera. Hal ini penting, karena saat ini partai politik di Indonesia tidak lagi memiliki garis ideologi yang jelas. Ideologi sebagian besar partai politik secara real adalah pragmatisme, karena hanya memperjuangkan posisi atau jabatan politik dan memburu rente untuk kepentingan ekonomi mereka. Public sulit membedakan dimana letak makna penting parpol Islam dan partai sekuler. Para politisi partai Islam tidak mampu menunjukkan eksistensi mereka sebagai sebuah kekuatan politik yang berbeda. Mereka sekedar politisi “biasa” yang beragama Islam tetapi tidak menunjukkan karakter dan perilaku Islami, terlibat korupsi, melakukan tindakan money politik, curang terhadap lawan politik dan lain sebagainya. Maka transformasi ideologi, reorientasi gerakan, perubahan agenda aksi menjadi kata kunci perubahan yang harus disegerakan.

1, January, 2008.

⁶ AKP mengusung ideologi baru sebagai kubu democrat konservatif dan berjanji berjalan berdampingan dengan sekularisme. Pemimpin AKP, Recep Tayib Erdogan sendiri secara implisit sudah menegaskan untuk tetap komitmen dengan sistem sekuler Turki. Sesaat setelah Partai AKP dinyatakan menang, Erdogan langsung berikrar untuk melindungi sistem sekuler negara ini dan meneruskan program pembaharuan ekonomi dan politik.

Penutup

Beberapa hal yang bisa kita catat sebagai kesimpulan dalam tulisan ini adalah bahwa komitmen keagamaan tidak lagi paralel dengan orientasi dan ekspresi politik. Beberapa peristiwa politik seperti Pilpres dan Pilkada menunjukkan bahwa faktor agama tidak lagi menjadi determinan dalam pilihan politik masyarakat muslim di Indonesia. Mayoritas umat Islam di Indonesia memandang politik sebagai arena yang berbeda dengan agama (*religiousitas*). Maka factor-faktor politik yang utama seperti kapasitas kepemimpinan, *trackrecord* dan citra personal menjadi penentu dalam pilihan politik. Dalam kasus pilkada, meskipun beberapa kandidat dan beberapa partai pendukung menggunakan isu dan simbol agama, namun factor agama bukanlah factor penentu kemenangan kandidat. Factor penentu justru berasal dari isu-isu populisme dan jaringan politik yang dibangun oleh partai dan kandidat.

Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa perubahan dan pergeseran orientasi politik para pemilih muslim di Indonesia tidak serta merta merupakan keberhasilan proses sekularisasi dalam modernisasi politik di Indonesia. Justru muncul fenomena pragmatisme dan hipokritisme yang menjadi gejala utama dalam politik Indonesia masa kini. Gejala ini memperlihatkan bahwa politik hanya sekedar arena perebutan kekuasaan dan upaya memburu rente bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam praktik politik semacam ini, kepentingan masyarakat bukan menjadi lokus utama dalam ideologi dan visi politik.

Bila partai politik atau kekuatan politik Islam di Indonesia tidak ingin mengalami kemunduran dan “terjerembab” dalam kekalahan dan kehancuran secara terus menerus, maka harus segera melakukan reposisi dan orientasi politik. Politik Islam tidak bisa bergantung pada keyakinan sosiologis yang absurd bahwa “mayoritas penduduk Islam di Indonesia adalah muslim, maka mereka pasti akan memilih partai Islam”. Sebaliknya bila ingin menjadi kekuatan politik dominan, kekuatan politik Islam harus mampu mereposisi ideologi, agenda politik dan aksi-aksi politik yang lebih substantif dan sekaligus membumi sesuai kebutuhan kontemporer masyarakat Islam Indonesia. *Semoga!*

Daftar Pustaka

- Bagir, Zainal Abidin, dkk. *Pluralisme Kewargaan, Arab Baru Politik Keragaman di Indonesia* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011)
- Baran, Zeyno. 2008. "Turkey Divided", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 19, No. 1, January, 2008.
- Bruce, Steve, "Secularisation and Politics", dalam Jeffrey Haynes (ed.), *Routledge Handbook of Religion and Politics*, (Newyork: Routledge, 2009)
- Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah*, (Jakarta: 1999)
- Crouch, Harold, "The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia", dalam Harold Crouch (Eds), *Islam in Southeast Asia : The Recent Development*, Singapore, ISEAS, Working Paper, No.1., Januari 2002.
- Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara* (Jakarta: Paramadina, 1998)
- *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001)
- Ernas, Saidin, *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik; Belajar dari Kasus Pesantren Al-Munawwir Krayak Yogyakarta*, (Jakarta; Kemenag RI, 2009)
- Glock. Antoni, *Psikologi Agama* (New york: 1982)
- Qodir, Zuly, "Kontekstualisasi Religiusitas dan Kontestasi Publik", dalam Irwan Abdullah, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009)
- *Islam Liberal; Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Liddle, R. William dan Saiful Mujani. 2007. The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New Indonesian Democracy, *Laporan penelitian*, 2003; R. William Liddle dan Saiful Mujani *Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia, Laporan penelitian*.
- Leege, David C dan Lyman A. Kellstedt, *Rediscovering The Religious Faktor in American Politics* (Jakarta: Kerjasama Keduataan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 1999)
- Madjid, Nurcholish, *Islam dan Kemoderenan* (Bandung: Mizan, 1987)
- Nasih, Mohammad, *Dinamika Islam dan Nasionalisme di Turki dan di Indonesia*. Disertasi Doktoral di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2010
- Mujani, Saiful, "Pemilu 2004 dan Fenomena Muslim Demokrat", *Tempo*, 21

Desember 2003.

Petterson, Thorleif. "Religious Commitment and Socio_Political Orientations: Diifferent Patterns of Compartementalisation among Muslim and Christian?", dalam dalam Jeffrey Haynes (ed.), *Routledge Handbooke of Religion and Politics* (Newyork: Routledge, 2009).

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2006)

[http://www.lsi.co.id/media/KAJLAN_BULANAN_EDISI_NOMOR_10_\(FEBRUARI_2008\)](http://www.lsi.co.id/media/KAJLAN_BULANAN_EDISI_NOMOR_10_(FEBRUARI_2008)).

<http://uk.messenger.yahoo.com>